BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Beban Pajak Tangguhan

Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan liabilitas atau asset pajak tangguhan (Waluyo, 2014:276).

Menurut Harnanto (2003:115) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiscal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan).

Beban pajak tangguhan adalah kenaikan saldo liabilitas pajak yang ditangguhkan dari awal hingga akhir periode akuntansi (Kieso, 2001:75).

Sedangkan menurut Philips, Pincus dan Rego (2003) mendefinisikan beban pajak tangguhan sebagai berikut :

> "Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiscal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)".

Berdasarkan keempat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan liabilitas dan adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiscal.

2.1.1.1 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiscal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi dibandingkan yang diperoleh menurut pajak. Perhitungan tentang pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indicator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset. Hal itu dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai terhitung dengan proporsional (Harnanto, 2003:115).

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan t}}{\text{Total Aset t}-1}$$

(Harnanto, 2003:115)

2.1.2 Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Brigham dan Houston (2011:331) adalah sebagai berikut :

"Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total asset dan total ekuitas".

Menurut Hartono (2008:254) definisi ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.

Menurut Agnes Sawir (2004:101) ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar.

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai skala dan ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aktiva perusahaan.

2.1.2.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1) Usaha mikro adalah usaha produktif mili orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Dalam peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, saham yang dicatatkan dibuat atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ditujukan untuk perusahaan tercatat yang berskala besar, sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuangan.

2.1.2.2 Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2002:307) ukuran perusahaan dihitung menggunakan Logaritma natural dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim, untuk menghindari data yang tidak normal tersebut maka total asset perlu dilogaritmakan. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aktiva)	Harahap (2002:307)

Keterangan :

Ln = Logaritma natural, adalah logaritma yang berbasis $\overset{e}{\rightarrow}$ dimana e adalah 2,718281828459 …… dan seterusnya.

Total Aktiva = semua aktiva yang dibahas, ketika ditambah secara bersamaan, menyajikan kembali total aktiva dari perusahaan atau jumlah sumber-sumber daya yang tersedia.

2.1.3 Manajemen Laba

Menurut Islahuzzaman (2012:257) mendefinisikan manajemen laba adalah sebagai berikut:

> "Manajemen laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi".

Sedangkan menurut Sulistyanto (2008:6) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut :

> "Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memperngaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan".

Menurut Irham Fahmi (2012:158) manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*).

Harnanto (2013:115) mendefinisikan manajemen laba adalah upaya memanfaatkan (perubahan) ketentuan perundang-undangan perpajakan dan standar atau metode akuntansi untuk memperoleh penghematan atau meminimalisasi beban pajak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajemen, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.

2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:33) ada beberapa bentuk rekayasa laba yang sering dilakukan pihak manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu :

1) *Taking a Bath*

   Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Bila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan bila kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meski kondisi sedang tidak menguntungkan.

2) *Income Minimization*

Cara ini hampir sama dengan taking a bath namun tidak ekstrim. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud mengurangi kemungkinan munculnya biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, serta pembebanan biaya riset

3) *Income Maximization*

Maksimalisasi laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak hutang jangka panjang.

4) *Income Smoothing*

Perusahaan cenderung lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil dari pada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Perataan laba dapat dicapai dengan suatu ketentuan yang tinggi untuk hutang dan bertentangan dengan nilai asset pada tahun yang baik sehingga ketentuan itu dapat dikurangi. Hal ini dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan pada masa yang buruk.

2.1.3.2 Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan akruals. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi (Sri Sulistyanto, 2008:211) yaitu:

1) Model berbasis *Aggregate Accruals*

   Model berbasis Aggregate Accrual yaitu Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discertionary accrual Sebagai proksi manajemen laba.

2) Model berbasis *Spesific Accruals*

   Model Berbasis Spesific Accruals yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.

3) Model berbasis *Distribution Of Earning After Management*

   Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dijadikan sebagai dasar pemahaman motivasi tindakan manajemen laba menurut Watts dan Zimmerman (Scott, 2009:287) yaitu :

a) *The Bonus Plan Hypothesis*

   Managers of firms with bonus plans are more likely to choose accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period.

   Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus

lebih mungkin untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan.

b) *The Debt Covenant Hypothesis*

All other things being equal, the closer a firm is to violation of accounting based debt covenants, the more likely the firm manager is to select accounting procedures that shift reported earnings from future periods to the current period.

Hipotesis ini menyatakan bahwa semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian hutang tersebut, maka semakin mungkin manajer menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode mendatang ke periode sekarang.

c) *The Political Cost Hypothesis*

All other things being equal, the greater the political costs faced by a firm, the more likely the manager is to choose accounting procedures that defer reported earnings from current to future periods.

Hipotesis ini menyatakan jika pada perusahaan yang besar memiliki biaya politik tinggi, maka manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari regulasi atau keputusan pemerintah, misalnya menaikkan pajak penghasilan perusahaan.

2.1.3.4 Indikator Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini discretionary accrual digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan kredit. *discretionary accrual* dapat dihitung melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1) Terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Secara sistematis, total akrual untuk periode tes dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$TA = NI - CFO$$

TA = total akrual
NI = Laba bersih
CFO = Arus kas dari operasi

2) Menghitung nilai *accrual* yang diestimasi dengan persamaan *ordinary least regression.*

$$TA/A_{it-1} = \beta_1(\frac{1}{Ait-1}) + \beta_2(\frac{\Delta REV}{Ait-1}) + \beta_3(\frac{PPEit}{Ait-1}) + e$$

3) Nilai NDAC (*nondiscretionary accrual*) dari persamaan regresi diatas dengan memasukkan nilai β

$$NDAit = \beta_1(\frac{1}{Ait-1}) + \beta_2(\frac{\Delta REV - \Delta Rec}{Ait-1}) + \beta_3(\frac{PPEit}{Ait-1}) + e$$

Keterangan :

TA/A_{it-1} = Total akrual / total asset tahun sebelumnya
$1/ A_{it-1}$ = 1 / total asset tahun sebelumnya
$\Delta REV / A_{it-1}$ = Perubahan pendapatan / total asset tahun sebelumnya
$PPEit/ A_{it-1}$ = Aset tidak lancar / total asset tahun sebelumnya

4) Menghitung *discretionary accrual*

$$DAC = TA/ A_{it-1} - NDA_{it}$$

Secara empiris, nilai diskrisioner akrual dapat bernilai 0, positif negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba yang dilakukan dengan perataan laba (*income smoothing*), sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penuruna laba (*income decreasing*) (Sulistyanto, 2008).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Manajemen Laba Dipengaruhi Beban Pajak Tangguhan

Menurut Suandy (2008:98) keterkaitan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba adalah :

> "Jika tujuan manajemen laba adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, maka manajemen laba secara hakikat ekonomisnya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali".

Purba (2009:35) menyatakan bahwa :

"Beban pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merekayasa laporan keuangannya".

Menurut Yulianti (2005) menyebutkan bahwa :

"Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba".

Menurut Yana Ulfah (2012) menyatakan bahwa :

“Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba”.

Menurut Andarumi, Titiek dan Agung (2015) menyatakan bahwa :

“Beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur”.

2.2.2 Manajemen Laba Dipengaruhi Ukuran Perusahaan

Menurut Ahmed Riahi Belkoui (2007:208) keterkaitan antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba adalah :

> “Perusahaan besar akan lebih diperhatikan oleh pihak luar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Para manager yang mengelola perusahaan besar tidak termotivasi untuk melakukan rekayasa dalam laporan keuangannya dan memilih untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham, sedangkan perusahaan kecil lebih leluasa untuk mengubah laporan keuangannya karena kurangnya perhatian dari pihak luar”.

Menurut Watt and Zimmerman (1976) dalam RR. Sri Handayani dan Agustono (2009) mengemukakan bahwa :

> “Ukuran perusahaan sebagai proksi dari *political cost*, dianggap sangat sensitive terhadap perilaku pelaporan laba. Perusahaan berukuran sedang dan besar lebih memiliki tekanan yang kuat dari para stakeholdernya, agar kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para investornya. Hal ini mendorong manajemen untuk dapat memenuhi harapan tersebut.”

Menurut Hasa Nurrochim dan Febrina Putri (2013) menyatakan bahwa :

“Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba”.

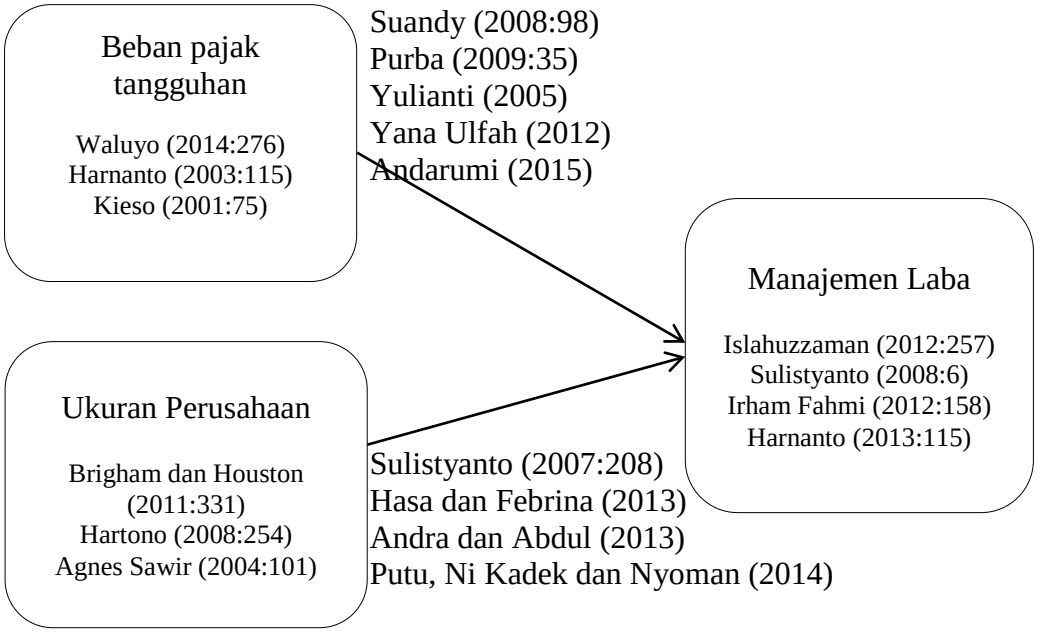
Menurut Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013) menyatakan bahwa :

“Ukuran perusahaan mempunyai arah hubungan yang positif terhadap manajemen laba”.

Menurut Putu A. Putra, Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Ari Surya (2014) menyatakan bahwa :

"Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba".

Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:96) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka dideduksi hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Manajemen laba secara signifikan dipengaruhi beban pajak tangguhan

H_2 : Manajemen laba secara signifikan dipengaruhi ukuran perusahaan